

**PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Oleh:**

**Monica Olivia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah, IAIN Pontianak  
*oliviaicamonica@gmail.com*

---

**.Article Info**

*Article History :*

*Received 16 July - 2022*

*Accepted 25 July - 2022*

*Available Online*

*31 July - 2022*

**Abstract**

*This research aims to examine the effects of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, capital expenditure to economic growth. The population in this study were 12 counties and 2 city in West Borneo Province during the period of 2016 – 2018. The data used in this research is secondary data obtained from the document of Badan Pusat Statistik of West Borneo Province on official website <https://kalbar.bps.go.id>. The analytical method used multiple linear regression analysis with a significance level of 5% and help of SPSS version 20. The results show in partially that specific fund allocation has negative significant effects on the economic growth; but region original revenue, general fund allocation and capital expenditure has no effects on the economic growth in West Borneo Province. While in simultaneously the fourth variables has no effects on the economic growth in West Borneo Province.*

*Keyword :*

*Region Original Revenue,  
General Fund Allocation,  
Specific Fund Allocation,  
Capital Expenditure, and  
Economic Growth.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Didalam sistem ini pemerintah pusat memberikan kewenangan yang seluas - luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat/daerahnya sendiri. Pengelolaan kepentingan masyarakat/daerah ini dapat dilihat dari laporan keuangan daerahnya masing-masing. Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan kebijakan ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tingkat pertumbuhan suatu daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik. Menurut Arsa, 2015 (dalam Rasdalima dkk, 2017) "Tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau telah memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi". Sedangkan menurut Sari, 2016 "Tata kelola keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan SDM yang handal, tetapi juga didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh sebab itu maka, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut telah memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya".

Mardiasmo, 2009 (dalam Gerungan dkk, 2016) menyatakan bahwa "Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya memiliki tiga misi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah".

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan untuk satu tahun kedepan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran daerah yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang/jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutupi defisit (kekurangan) Anggaran Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetapnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal didefinisikan sebagai "Pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud". Menurut PP No. 71 Tahun 2010 "Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan keuntungan jangka panjang secara finansial. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas".

Otonomi daerah ini juga dikenal dengan istilah desentralisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, "Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya". Dalam sistem ini pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Menurut Sukirno, 2010 (dalam Dewi dkk, 2017) "Pertumbuhan

ekonomi dapat diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat mengalami kenaikan (bertambah)". Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota**  
**/Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2016-2018 (%)**

Provinsi/Kab/Kota	2016	2017	2018
Kalimantan Barat	5.20	5.17	5.06
Kab. Sambas	5.24	5.13	5.10
Kab. Bengkayang	5.15	5.66	5.37
Kab. Landak	5.28	5.21	5.12
Kab. Mempawah	5.99	5.93	5.87
Kab. Sanggau	5.34	4.50	4.47
Kab. Ketapang	7.97	7.21	7.99
Kab. Sintang	5.28	5.33	5.47
Kab. Kapuas Hulu	5.28	5.39	5.23
Kab. Sekadau	5.93	5.85	5.88
Kab. Melawi	4.75	4.79	5.44
Kab. Kayong Utara	5.98	5.42	5.02
Kab. Kubu Raya	6.37	6.56	5.49
Kota Pontianak	5.08	5.05	5.03
Kota Singkawang	5.17	5.42	4.71

Sumber : <https://kalbar.bps.go.id>, data diolah 2022

Pada tabel 1.1 diatas dapat kita lihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan yaitu 5.20% (2016), 5.17% (2017), menjadi 5.06% (2018). Brata, 2004 (dalam Dewi dkk, 2017) menyatakan bahwa "Terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka ada kemungkinan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD".

Ollukayode, 2009 (dalam Dewi dkk, 2017) mengatakan bahwa "Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian. Dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk menambah fasilitas publik". "Belanja modal (BM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian daerah tersebut" (BPS, 2015). Mardiasmo, 2009 (dalam Gerungan dkk, 2016) menyatakan bahwa "Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah".

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin melakukan analisis tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Harapannya hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh yang muncul baik secara parsial maupun simultan yang diakibatkan oleh realisasi PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut Syukriy dan Halim, 2003 (dalam Dewi dkk, 2017) disebutkan bahwa "Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lainnya".

Peningkatan PAD dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar PAD membuat pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik daripada sebelumnya. Semakin tinggi nilai PAD akan mampu memaksimalkan kegiatan pada bagian yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi contohnya bagian industri serta perdagangan, jasa, serta yang lainnya. (Anwar dkk, 2016)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

## DANA ALOKASI UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Menurut Gan dkk, 2005 (dalam Dewi dkk, 2017) “DAU merupakan suatu sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah baik secara horizontal maupun vertikal”.

Semakin tinggi DAU yang dipakai agar tersebarnya kemampuan keuangan daerah, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Menurut Siti Dini dkk, 2021 menyimpulkan bahwa “semakin besar DAU, maka semakin tinggi nilai Pertumbuhan Ekonomi. DAU dapat mengatasi ketidakseimbangan infrastruktur dan juga dapat menekankan keadilan sesuai urusan pemerintah untuk menciptakan Pertumbuhan Ekonomi.”

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis 2 sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **DANA ALOKASI KHUSUS**

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional”.

Apabila DAK semakin besar, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta apabila DAK semakin kecil, Pertumbuhan ekonomi semakin menurun. (Siagian, 2018) Jadi dapat kita simpulkan DAK menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten, sebab dana tersebut sumbernya dari pemerintah pusat dan dianggarkan pemerintah daerah untuk penanganan kegiatan khusus agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Makin besar DAK, makin tinggi pertumbuhan ekonominya. (Siti Dini dkk, 2021)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **BELANJA MODAL**

Ollukayode, 2009 (dalam Dewi dkk, 2017) mengatakan bahwa “Pengeluaran pemerintah

merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk menambah fasilitas publik”. “Belanja modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian daerah tersebut” (BPS, 2015). Mardiasmo, 2009 (dalam Gerungan dkk, 2016) menyatakan bahwa “Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah”.

Sehingga Belanja Modal merupakan hal penting dalam Pertumbuhan Ekonomi karena makin tinggi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi juga makin baik dan mendorong daerah untuk mengembangkan potensi fasilitas dan pelayanan publik serta meningkatkan aset jangka panjang. (Siti Dini dkk, 2021)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Dalam Rori dkk, 2016 menyatakan bahwa “PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah semua nilai barang serta jasa yang didapatkan dari semua aktivitas ekonomi di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dipakai untuk penjelasan umum yang menampilkan tingkat pertumbuhan negara yang dilihat lewat pertambahan penghasilan nasional riil.”

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dihitung dengan satuan PDRB yang dipakai untuk penerangan atau pengukuran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kriteria yang dipakai untuk pengukuran prestasi ekonomi negara tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kondisi meningkatnya PDRB dari suatu daerah yang dinyatakan mengalami peningkatan apabila terdapat kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. (Siti Dini dkk, 2021)

Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bersumber pada data sekunder yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: <https://kalbar.bps.go.id>. Menurut Sugiyono (2015), "Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan". Sedangkan Penelitian berbentuk asosiatif menurut Rahyuda, dkk (2004) yaitu "Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih".

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono, 2015 "Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka/bilangan". Sumber data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2018 dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan) (publikasi BPS, Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka tahun 2016-2018). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2018. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 variabel x 14 pemerintah kabupaten/kota x 3 tahun = 210.

Variabel dependen/terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus (Bappenas, 2003 dalam Dewi, dkk 2017):

$$PDRB = \frac{PDRB(t) - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB(t)= Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang

PDRB(t-1)= Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sebelumnya

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja

Modal (X4). PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU):

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK):

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk menghitung rasio Belanja Modal (BM):

$$\text{Rasio BM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan dengan teknik analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, 2, 3, 4$  = Koefisien determinasi

X1 = PAD

X2 = DAU

X3 = DAK

X4 = Belanja Modal (BM)

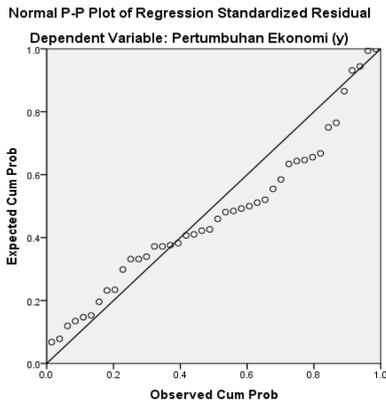
e = Error

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dipaparkan melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Serta uji regresi linier berganda yang meliputi uji t parsial dan uji f simultan, sehingga dapat menjawab hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. Berikut pemaparan dari masing-masing hasil uji yang telah penulis lakukan dengan alat bantu SPSS versi 20.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Gambar 1**



Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal apabila data *ploting* (titik-titik) yang menggambarkan data penelitian mengikuti garis diagonal. Dilihat dari gambar 1, maka model regresi pada penelitian ini telah terdistribusi dengan normal dan layak untuk diteliti.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3.1 Hasil Uji Multikolinearitas**

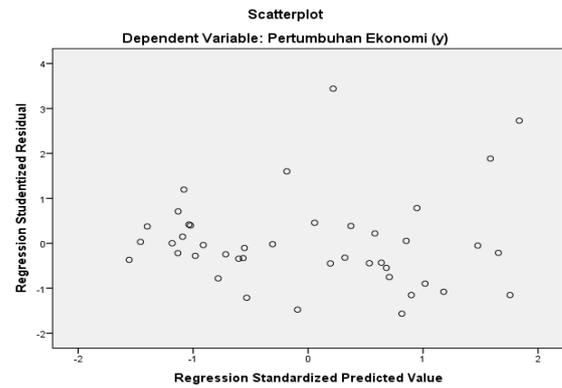
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD (X1)	.393	2.542
DAU (X2)	.531	1.882
DAK (X3)	.566	1.765
BM (X4)	.919	1.088

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yaitu toleran PAD(X1) 0,393 > 0.100, DAU(X2) 0.531 > 0.100, DAK(X3) 0.566 > 0.100 dan BM(X4) 0.919 > 0.100 serta nilai VIF PAD(X1) 2.542 < 10.00 DAU (X2) 1.882 < 10.00 DAK(X3) 1.765 < 10.00 dan BM(X4) 1.088 < 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada data penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

**Uji Heteroskedastisitas Scatterplots**

**Gambar 2**



Dalam suatu penelitian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak membentuk suatu pola yang jelas pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola/bentuk yang jelas. Sehingga dari hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3.2 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Squared	Adjs. R Square	Std. Error	Durbin - Watson
1	.425 <sup>a</sup>	.181	.092	.72981	2.255

Sumber: Data diolah, 2022

Suatu penelitian dapat dikatakan tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak diantara du sampai dengan (4-du). Dalam penelitian ini nilai du (1.7202) < dw (2.255) < (4-du) (2.2798), artinya tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini.

**Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	Standard. Coef.	T	Sig.
Cons	4.929	2.116	2.330	0.025
X1	-0.020	0.029	-0.693	0.493
X2	0.031	0.030	2.048	0.032

	X3	-	0.03	-	-	0.083
		0.053	0	0.35	1.78	
	B	0.00	0.02	0.01	0.08	0.932
	M	2	1	3	5	
Adjusted R Square		0.092				
F Hitung		2.039				
Sig. F		0.109				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diperoleh rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.929 - 0.020X_1 + 0.031X_2 - 0.053X_3 + 0.002X_4 + e$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel PAD (X1) dan DAK (X3) memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), variabel DAU (X2) dan Belanja Modal/BM (X4) memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Kemudian dari nilai Adjusted R Square sebesar 0.092 dapat diketahui bahwa pengaruh keempat variabel independent yaitu PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap variabel dependent (Pertumbuhan Ekonomi) hanya sebesar 9.2%, sisanya 90.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### Uji T Parsial

Dalam Imam Ghozali (2006) "Jika nilai sig. < 0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y). Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:155) "jika nilai t-hitung > t-tabel maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y)".

Pada Tabel 3.3 diketahui bahwa nilai sig. PAD (X1) adalah 0.493 > 0,05 maka dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X1 terhadap Y. Sedangkan untuk t-hitung PAD(X1) < t-tabel yaitu -0.693 < 2,026 artinya variabel PAD (X1) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa, dkk 2017 dimana PAD memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penyebabnya adalah karena pengalokasian PAD terhadap Belanja Langsung dalam hal ini belanja modal lebih kecil dibanding dengan Belanja Tidak Langsung, sehingga Pertumbuhan Ekonominya mengalami penurunan.

Hal yang sama terjadi pada variabel DAU(X2) memiliki nilai sig. sebesar 0.302 > 0,05 sehingga diketahui bahwa DAU(X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi (Y). Untuk nilai t-hitung DAU(X2) < t-tabel adalah 1.048 < 2.026 sehingga diketahui bahwa variabel DAU(X2) tidak memiliki pengaruh parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa **H2 ditolak**.

Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Dini dkk, 2021 bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Aceh. Hal ini disebabkan karena DAU yang diperoleh tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana tetapi hanya sebagian kecil yang dipakai. Ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU, maka akan semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah malah mendapat alokasi DAU yang lebih tinggi dikarenakan perhitungan DAU berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi fiskal pada daerah tersebut.

Sedangkan untuk variabel DAK (X3) yang memiliki nilai sig. 0.038 < 0.05 maka dapat diketahui bahwa DAK (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pada nilai t-hitung DAK (X3) > t-tabel sebesar -2.780 > 2.026 maka variabel DAK(X3) memiliki pengaruh parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan bernilai negatif. Hal ini berarti, jika variabel independen lain tetap dan variabel DAK(X3) mengalami kenaikan 1% maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 0,038%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**.

Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala, 2018 dimana DAK memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan DAK dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomi yang panjang, termasuk juga pengadaan sarana fisik penunjang yang mana ini sesuai dengan kriteria belanja modal.

Sementara itu pada variabel Belanja Modal(X4) yang memiliki nilai sig. 0.932 > 0.05 maka dapat diketahui bahwa Belanja Modal(X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pada nilai t-hitung Belanja Modal (X4) < t-tabel yaitu sebesar 0.085 < 2.026 maka variabel Belanja Modal(X4) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (Y). Maka disimpulkan bahwa **H4 ditolak**.

Hasil yang didapat sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Dini dkk, 2021 bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Aceh. Hal ini terjadi karena kurang tepatnya pengalokasian belanja modal dan pemerintah yang kurang produktif dalam belanja infrastruktur. Selain itu juga belanja modal tidak dapat dinikmati dalam jangka pendek/ pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

#### Uji F Simultan

Pada Tabel 3.3 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,109 > 0,05$  dan nilai Fhitung  $< F_{tabel}$  yaitu sebesar  $2.039 < 2.620$  sehingga dapat disimpulkan bahwa **H5 ditolak** yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD (X1), DAU(X2), DAK(X3), dan Belanja Modal (X4) secara bersama-sama/simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil tersebut berbeda dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dini dkk, 2021, dimana secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Aceh.

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 20 diketahui bahwa :

1. Secara parsial PAD, DAU, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan DAK memiliki pengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan dana bantuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Hal ini ditujukan untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan fiskal antar provinsi agar kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah dapat tercapai.

#### 6. REFERENSI

- Dewi, Ni Wayan Ratna, dkk. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18 No. 3, Hal 1745-1773.
- Dini, Siti dkk, 2021. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 4, Nomor 2 hal 65-80.
- Gerungan, Henri Paulus, dkk. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado, Vol. 8 No. 1 Hal 233-245.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro
- <https://kalbar.bps.go.id>
- Kumala, Dayana N.C. 2018. Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal (Studi Kasus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 6 No. 2
- Kumendong, Febricia Frontalin, dkk. 2020 Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal: Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 5 No. 1 Hal 50-56.
- Lisa, Yulianus dkk (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Forum Ekonomi Volume 19 (2), 2017 hal 162-173
- Rahyuda, I Ketut, dkk. 2004. Metodologi Penelitian. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Rasdalima, Robert. J, dkk. 2017. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 17 No.1 Hal 134-145.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten (PAD) Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

Sari, Greydi Normala. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*. Manado, Vol 18 No. 2 Hal 1-19.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wandiri, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 1 Hal 44-51.